

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ulasan Studi-studi Terdahulu

Mengenai konflik perkebunan sawit, Basyar (1999) dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam ekonomi politik yang dianut oleh pemerintah saat itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar merupakan implikasi dari kebijakan konversi hutan atau pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar untuk memenuhi permintaan global dan investasi untuk perkebunan sawit yang meningkat. Dalam kenyataannya implikasi kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi mikro yang menjadi tumpuan rakyat. Berbagai implikasi negatif turut menyertai kebijakan yang dikeluarkan dalam kerangka rencana pemerintah pusat, baik peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakannya, dan kerangka investasi yang didorong oleh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Dan permasalahan bahwa di wilayah yang dikonversi menjadi perkebunan tersebut merupakan wilayah yang telah diduduki oleh masyarakat dan dikelola menjadi kebun mereka.

Sementara itu, berdasarkan catatan sejarah, investasi perkebunan sawit telah dilakukan semenjak masa kolonialisme, yaitu di tahun 1920 dimana industri perkebunan merupakan sumber pendapatan yang baik dan investasi yang baik. Industri perkebunan sawit bersama dengan perkebunan karet berkembang di sepanjang sabuk pulau Sumatra. Industri perkebunan yang dibangun ini memiliki ciri khas kolonial di masa usaha kapitalisme berkembang (Stoler, 2005). Sistem perkebunan yang dikembangkan di wilayah ini dan di masa ini, memiliki persoalan khas dimana ada kesinambungan pola hubungan perkebunan dengan buruhnya, dimana 'kuli kontrak' yang dibawa dari Jawa sebagai buruh dan petani di perkebunan besar di masa kolonial Belanda dengan di masa Indonesia merdeka, karyawan perkebunan yang mengabdikan pada perusahaan memiliki hak yang istimewa dan berbeda dengan buruh perkebunan.

Persoalan dengan buruh kebun yang dihadapi oleh perkebunan di era tahun 70-an merupakan masalah dan sengketa buruh di Sumatra. Dalam masa itu, pernyataan yang paling sering dikemukakan adalah berbagai demonstrasi besar yang terjadi merupakan

akibat dari pengaruh dan manipulasi dari sekelompok aktivis buruh, yang melakukan kegiatan atau bagian kegiatan atau agenda di luar kepentingan buruh yang terlibat (Stoler, 2005: xxxv). Sengketa buruh dan perkebunan yang terjadi sampai sekarang di wilayah Sumatra terutama diawali dari pengusuran warga dan milik yang dilakukan oleh perusahaan asing, dalam hal ini multinasional di tahun 1920-an yang masih berlanjut sampai sekarang dan merupakan konflik perkebunan yang terjadi sampai saat ini.

Pada tahun 2005, Menteri Perkebunan mengeluarkan sebuah kebijakan dan rencana untuk mengembangkan perkebunan sawit di perbatasan Indonesia dan Malaysia yang menimbulkan reaksi keras di dalam negeri dan maupun luar negeri atas rencana tersebut, disinyalir rencana tersebut bertujuan untuk melakukan ekstraksi terhadap kayu yang ada di perbatasan selain adanya peningkatan investasi di sektor sawit yang sangat menguntungkan terlepas dari pro dan kontra adanya upaya untuk menekan laju produksi CPO (*Crude Palm Oil*) melalui kontrol terhadap bagaimana industri ini berkembang di Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar CPO.

Penelitian Colchester *et all* (2006) mendokumentasikan situasi, berbagai pandangan dan rekomendasi komunitas lokal dan petani kecil, yang terlibat atau mendapat imbas dari kegiatan produksi minyak sawit; 2) mengukur berbagai dampak yang ditimbulkan akibat perluasan penanaman kelapa sawit di Indonesia terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat; 3) Mendokumentasikan perlindungan hukum atas lembaga adat dan hak adat; 4) Memahami secara mendalam langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh perusahaan dalam pembebasan tanah guna penanaman kelapa sawit di Indonesia; 5) Mengukur sejauhmana hukum (peraturan) dipatuhi dan benar-benar melindungi berbagai kepentingan dan hak komunitas serta masyarakat adat; 6) Memastikan apakah standar sertifikasi sawit berkelanjutan sesuai dengan kenyataan Indonesia dan benar-benar dapat diterapkan oleh komunitas lokal, pejabat pemerintah dan perusahaan; 7) Membuat rekomendasi yang terkait dengan agenda reformasi hukum, kebijakan dan prosedur yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sesuai dengan kewajiban negara yang tertera dalam hukum internasional. Kajian ini sebenarnya dikembangkan oleh adanya *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebuah inisiatif yang didorong oleh kalangan industri melibatkan organisasi konservasi dan kelompok yang mendorong keadilan sosial, bertujuan untuk

mereformasi cara perkebunan kelapa sawit dikembangkan berdasarkan norma dan standar internasional. Penelitian dilakukan di tiga wilayah kabupaten dimana salah satunya di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini menemukan sejumlah masalah meliputi hukum dan peraturan perundangan memperlemah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi negara. Ditemukannya kesenjangan antara pengakuan secara hukum dan implementasi di lapangan. Kebijakan berpihak pada pembangunan perkebunan skala besar, yang bertujuan untuk memastikan keamanan investasi, dengan perencanaan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum atau dalam hal ini perusahaan yang mendapatkan ijin membangun perkebunan sawit skala besar.

Dari hasil telaah literatur, dokumen dan juga diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, topik yang dibahas terutama yang berkaitan dengan prinsip *Free Prior Inform Consent* (FPIC) yang terinstitusionalisasi dalam RSPO dan menjadi standar dan kriteria yang diberlakukan kepada anggotanya dan menguasai pasar Eropa menunjukkan integrasi dari aturan-aturan sektor non formal yang masuk ke dalam sektor formal pasar. Dalam hal ini kelompok-kelompok yang menganggap penting kredibilitasnya di pasar Eropa terjaga perlu melakukan upaya-upaya niat baiknya dalam melakukan investasi, bisnis dalam sektor sawit dengan mengajukan konsep industri sawit berkelanjutan. Jika melihat situasi yang ada, standar dan kriteria RSPO memberikan peluang dan keterbukaan terbentuknya 'kontrak baru' dimana masyarakat mendapatkan *equality* dalam hal hubungan kerjasamanya dengan perusahaan di tingkat akar rumput. Dalam kerangka perjuangan tingkat lokal, apa yang terjadi merupakan upaya untuk membangun sebuah sistem dan lembaga ekonomi yang lebih bertanggungjawab dalam menghasilkan sebuah sistem kerjasama yang memberikan hasil yang lebih berimbang dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Gambar 2 tentang aktor-aktor yang berperan dalam reproduksi instrumen standar dan kriteria RSPO untuk sertifikasi sawit berkelanjutan (lihat halaman 17) menunjukkan adanya hubungan antara mikro dengan konteks lokal dan meso dengan konteks nasional yang berada di dalam sistem global, bentuk relasi yang ada adalah global market mempengaruhi juga perilaku ekonomi meso, dan pada akhirnya juga kepada lokal. Dalam konteks perlawanan, bagaimana peran-peran aktor dalam sistem ini, menurut

Situmorang (2007) ditentukan oleh faktor peluang dalam struktur politik menyebabkan gerakan masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan maupun gerakan lingkungan mendapatkan momentumnya dan diterima di konteks sistem sosial global. Konsep FPIC yang didesakan oleh kelompok pendorong keadilan buat masyarakat adat maupun lokal telah diadopsi dalam instrumen pasar internasional untuk sawit berkelanjutan¹. Upaya yang dilakukan di tingkat global merupakan upaya yang juga dilakukan di tingkat lokal.



Gambar 2. Aktor-aktor yang berperan dalam Reproduksi Instrumen Standar dan Kriteria RSPO untuk sertifikasi sawit berkelanjutan
(Sumber: penulis, reading course)

2.2. Teori-teori Gerakan Sosial dan Perlawanan Terhadap Pembangunan Merusak

Resistensi berbeda dengan perlawanan terhadap kekuasaan dimana resistensi berguna untuk menyumbang, dalam beberapa cara, untuk perubahan progresif pada lingkungan melalui usaha-usaha untuk merusak “reproduksi struktur sosial dan hubungan

¹ Sawit berkelanjutan mengikuti konsep sertifikasi kayu pada pasar internasional. Sistem pemberian sertifikasi diberi oleh lembaga sertifikasi independen dan bebas dari peran negara. Pengusaha mengikuti sertifikasi untuk memberikan informasi bahwa pembalakan yang dilakukan dengan manajemen hutan yang berkelanjutan

sosial yang menindas” (Abowitz, 2000). Resistensi ada jika ada kekuasaan yang menghegemoni (Seymour, 2006).

Situmorang (2007) menganalisis gerakan sosial dengan mempergunakan *political opportunity structure* (POS) atau struktur kesempatan politik yang berguna untuk menjelaskan gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan. Mekanisme ini pertama kali digunakan oleh Eisinger yang mengadopsi pandangan Tocqueville yang mengatakan bahwa revolusi tidak terjadi ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan. Tetapi, aksi kolektif berupa revolusi muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. Secara spesifik Mc Adam (1982) dan Tarrow (1989a) dalam Situmorang (2007) menjabarkan mekanisme POS secara spesifik menambahkan variabel lain selain yang dikemukakan Eisinger, yaitu pertama gerakan sosial akan muncul ketika tingkat akses kepada lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk, ketiga ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan, keempat, ketika para pelaku digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.

Penelitian Situmorang (2007) mempergunakan gerakan sosial memakai POS terhadap beberapa studi kasus tentang gerakan sosial, mulai dari gerakan reformasi di Malaysia dan Indonesia yang merupakan analisis perbandingan, perempuan, tentang perlawanan dari bawah seperti kelompok akar rumput menentang tambang di Hutan Lindung, gerakan penghapusan hutang, dan lain-lain. Dalam kasus perlawanan menentang tambang di Hutan Lindung, faktor perubahan politik di tahun 1998 mendorong terbukanya struktur kesempatan politik. Jatuhnya Pemerintah Orde Baru memberikan kebebasan berbicara, berdemonstrasi dan berorganisasi. Hal lain juga penting adalah adanya kebebasan pers dan media untuk memberikan pemberitaan berimbang selain ditariknya militer dari keterlibatan aktifnya di politik. Situasi ini menyebabkan elit politik lebih berani mengkritik kebijakan pemerintah bila merugikan rakyat dan lingkungan, selain pemerintah mengatur kepentingan publik dan lingkungan.

Radical ecology muncul dari perasaan krisis di negara industri, yang menghadapi dominasi alam terhadap dominasi manusia dari setiap ras, kelas dan jender. Radikal

ekologi mengkonfrontasi kesan bahwa manusia bebas mengeksploitasi alam dan bekerja dalam masyarakat dengan saling mengalahkan yang lain, dengan kesadaran yang baru terhadap alam dan sesama manusia. Dalam hal ini radikal ekologi mengkonfrontasi bahwa manusia bebas mengeksploitasi alam dan bekerja dengan cara mengambil keuntungan dari orang lain. Bertujuan untuk melakukannya dengan etika yang baik dalam merawat alam dan sesama. Sehingga gerakan ini mendorong untuk terjadinya perubahan dan transformasi, namun demikian gerakan ini tidak bersifat monolitik (Merchant, 1992). Dalam penjelasannya selanjutnya, persoalan lingkungan terjadi karena adanya tegangan antara tekanan ekonomi yang mendorong produksi dan keadaan ekologi setempat. Yang kedua adalah ketegangan antara reproduksi dan produksi, yang dalam hal ini baik pada masyarakat modern, apakah itu negara kapitalis maupun sosialis, keduanya telah menghasilkan kondisi lingkungan yang buruk. Gerakan ekologi radikal secara langsung untuk menyelesaikan kontradiksi yang terjadi antara ekologi dan produksi, dan kontradiksi antara produksi dan reproduksi (Merchant, 1992).

Lori Ann Thrupp membagi gerakan lingkungan berkelanjutan berbeda antara yang berpaham lingkungan ekologis atau saintifik dengan berpaham lingkungan anti kemapanan dalam hal aspek-aspek pandangan terhadap alam dan ekologi, teori dan penjelasan masalahnya, ideologi dan etika hubungan manusia dan alamnya, pandangan politik, perhatian dan fokusnya, pola partisipasi, pandangan terhadap masalah energi, pertumbuhan, dan energi nuklir, dan strategi untuk menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, secara ideologis kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang melakukan tarik menarik dalam gerakan lingkungan (Merchant, 1992).

Hannigan (1995) melihat dua masalah yang utama dalam literatur yang telah ada di sosiologi lingkungan yaitu tentang penyebab kerusakan lingkungan, dan munculnya kesadaran dan gerakan lingkungan. Dalam Novriaty (2006) penelitian-penelitian tentang gerakan lingkungan dan perilaku kolektif seputar isu lingkungan menemukan gerakan sosial baru yang sangat banyak, berbeda dan sangat strategis. Di antaranya adalah kelompok protes sosial, aktivitas pembuatan undang-undang pemerintah, yang memberikan perhatian pada ketidaksetaraan sosial yang berkaitan dengan polusi lingkungan, degradasi dan bencana, membantu memantapkan bahwa *environmental*

racism/injustice, atau ketidakmerataan penempatan limbah dan polusi pada komunitas kulit berwarna dan kelas pekerja adalah hal yang lazim di Amerika Serikat dan sekitarnya.

Menurut Tindall dalam Novriaty (2006), subdomain gerakan sosial dan tindakan kelompok masuk di dalam sosiologi lingkungan, yang terbagi menjadi teori Mobilisasi Sumberdaya yang fokus pada struktur sosial dan sumberdaya bagi tindakan kolektif dan Teori Gerakan Sosial Baru fokus pada makna simbolik dari tindakan kolektif. Teori ini juga fokus pada makrososial, struktural dan historis yang mempercepat gerakan sosial. Fokus pada kualitas kehidupan dan pada partisipasi akar rumput. Dalam subdomain ini, teori, perspektif dan konsep yang ada sampai sekarang adalah teori Mobilisasi Sumberdaya, teori Gerakan Sosial Baru, gerakan *Not in My Backyard* (NIMBY), gerakan teknologi yang layak dan profeminisme. Metode utama yang dapat dipakai adalah variasi dari analisa sekunder, analisa survai, dan pengamatan terlibat.

Berapa lama gerakan sosial mampu bertahan? Ada beragam jawaban tergantung isu dan masalahnya. Ada yang berakhir dalam beberapa minggu tapi ada juga yang mampu bertahan hingga bertahun-tahun. Jika transformasi sosial merupakan suatu proses perubahan relasi yang secara fundamental lebih baik dan lebih adil, maka transformasi sosial menyangkut perubahan relasi kelas antara perusahaan dan buruh dari relasi yang eksploitatif menuju ke relasi yang lebih adil, atau juga merubah relasi atau gender dari yang diskriminatif ke relasi yang adil gender (Fakih dalam Zubir, 2000).

Pembangunan dan modernisasi sesungguhnya juga merupakan teori dan praktek maupun kebijakan tentang perubahan sosial dari ideologi yang berbeda, yakni suatu teori perubahan sosial dari perspektif evolusi sosial dan fungsionalisme dengan berprinsip pada keyakinan akan kebebasan individu dalam paham demokrasi liberal. Sungguhpun begitu, terdapat variasi di kalangan penganut teori pembangunan dan modernisasi seputar peran negara, model pertumbuhan ekonomi maupun kritiknya (Zubir, 2002).

Dalam pertarungan ideologi pembangunan, kritik terhadap paradigma dan strategi pembangunan ekonomi setelah perang dunia kedua karena telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan tersebut membawa dampak negatif di antaranya karena melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan dan ketimpangan, eksploitasi sumberdaya alam, dan ketidakadilan walaupun bertujuan untuk pertumbuhan dan *equity*. Hal mendasar yang menyebabkan dampak negatif tersebut adalah pendekatan

yang dipakai dalam meraih pertumbuhan dimana keberhasilan model pembangunannya diukur dengan ukuran pertumbuhan GNP. Yang tidak memberikan keuntungan pada masyarakat-masyarakat di tingkat bawah. Inilah yang mendorong terjadinya arus gerakan untuk mencapai adanya keadilan dan mendorong pembangunan dengan cara yang berbeda (Fakih, 2003). Sehingga perubahan sosial yang direncanakan tidak menyentuh masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di aras akar rumput.

Pieterse (2001) menyatakan bahwa banyak kritik terhadap arus utama paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan. Salah satu yang berkembang bersama waktu yang memiliki posisi kritik terhadap arus utama pembangunan, yaitu pembangunan alternative. Ia menyatakan bahwa sebagai arus balik terhadap paradigma utama pembangunan, pembangunan alternatif memiliki profil yang tidak ketat. Pembangunan alternatif pertama kali digunakan oleh gerakan hijau di tahun 1980-an. Sehingga di khasanah pembangunan, ada tiga posisi dari pembangunan, yaitu pembangunan arus utama, pembangunan alternatif, dan terakhir adalah pasca pembangunan.

Walaupun sebagai pemikiran dan paradigma pembangunan alternatif mendapatkan kritikan atas posisinya sebagai paradigma, arus ini memberikan jalan dan mempertajam posisi asertif dari pendukungnya dan didukung oleh beberapa trend yang dapat dilihat dengan jelas. Trend tersebut ditunjukkan oleh 1) peningkatan lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan tuntutan atas dan pengaruh terhadap pembangunan, sehingga perlu perspektif teoritis dan strategi tertentu, 2) semakin meningkatnya perhatian dan nilai penting dari lingkungan dan keberlanjutan yang memperlemah paradigma pertumbuhan ekonomi dan mendukung paradigma ekonomi alternative dan berperspektif ekologis, 3) fakta-fakta kegagalan pembangunan berpuluh-puluh tahun yang menggeser paradigma arus utama, 4) adanya kecurigaan pada *Bretton Woods* bahwa partisipasi dan demokrasi lebih dilihat sebagai hal-hal prosedural dan kelembagaan dan bahwa karena pada dasarnya memiliki prinsip yang berbeda.

Pieterse (2001) juga menyatakan bahwa memang sebagai pembangunan alternatif, dia memiliki kecenderungan tidak didefinisikan namun dipraktikkan, sehingga logika pembangunan alternatif adalah pembangunan yang berbasis masyarakat, pengetahuan pembangunan berasal dari masyarakat, dan merupakan pengetahuan masyarakat yang artinya tidak terabstraksi dalam pengetahuan para ahli.

Gerakan sosial baru yang digunakan adalah terjemahan bebas dari *social movement* yang memiliki konotasi suatu pendekatan perubahan sosial dari perspektif transformasi sosial, yang dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka mendukung suatu tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial. Meskipun gerakan yang merupakan hasil dari spontanitas rakyat bersama, di mana hubungan mereka tidak diatur oleh aturan atau prosedur, melainkan hanya melalui kesamaan wawasan atau cara pandang di masyarakat. Meskipun demikian dalam kenyataannya gerakan sosial dapat juga berhaluan kanan dan secara ideologi berwatak reformatif. Umumnya gerakan sosial lebih dianggap memiliki orientasi pada perubahan, bukan karena kesamaan analisis. Namun kenyataannya juga menunjukkan bahwa gerakan sosial seringkali juga mengalami perkembangan tujuan dibanding pada saat ketika gerakan dimulai (Mansour Fakhri dalam Zubir, 2002). Demikian pula dinyatakan bahwa gerakan sosial yang berkembang di Selatan lebih beragam dan tidak memiliki satu aliran utama saja (Pietersie, 2001: 108).

Dua teori gerakan sosial yang ada, di Amerika dilahirkan teori yang dikenal sebagai Teori Mobilisasi Sumberdaya (*resource mobilization theory*). Teori yang lahir sebagai antitesis terhadap teori sebelumnya, dimana gerakan sosial muncul akibat dari penyakit sosial. Teori lama berangkat dari asumsi dari dukungan dari mereka yang terisolasi dan teralienasi di masyarakat. Tapi menurut teoritis ini, gerakan sosial muncul akibat dari adanya ketersediaan sumber pendukung gerakan, tersedianya kelompok koalisi, adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif. Dan salah satu sumber daya yang penting adalah juga ideologi (Canel, 1997).

Kedua teori di atas muncul untuk menjawab teori tradisional yang menggunakan aksi kolektif dengan referensi terhadap ketimpangan struktural, krisis ekonomi dan eksploitasi. Teori lama berasumsi bahwa perjalanan dari kondisi tereksplorasi dan frustrasi bertujuan untuk membalikkan posisi secara kolektif untuk membalikkan situasi tersebut secara sederhana, langsung dan tidak termediasi. Sementara kedua paradigma yang baru mengusulkan bahwa perjalanan dari kondisi ke aksi adalah kontijensi, dengan proses yang terbuka dan dimediasi oleh faktor perbantuan and struktural.

Teori yang muncul dikenal dengan nama *New Social Movement Theory* (Teori Gerakan Sosial Baru). Teori Gerakan Sosial Baru dilahirkan akibat kekecewaan para

intelektual terhadap pandangan teori Marxist tentang revolusi sosial dimana gerakan sosial sebagai cerminan dari perjuangan kelas sekitar proses produksi, dan oleh karena gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat atau dimotori oleh kaum buruh. Sebaliknya mereka mengembangkan teori bahwa dalam perkembangan sistem kapitalisme justru mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam sistem eksploitasi produksi semakin besar dan merasakan kekecewaan serta melahirkan posisi tawar kolektif terhadap negara. Oleh karena itu gerakan sosial baru tumbuh berkembang di zaman menguatnya kapitalisme negara *state-led development* serta pada era globalisasi neoliberal saat ini.

Teori gerakan sosial yang disebut Teori Gerakan Sosial Baru menempatkan arah perjuangan gerakan melawan ketimpangan sosial atas dominasi kapitalisme negara, dominasi media massa, serta kapitalisme industri dan gerakan antiglobalisasi. Gerakan ini tidak saja dimotori oleh kaum buruh, melainkan juga gerakan mahasiswa, gerakan feminis, gerakan antiperang, gerakan lingkungan, gerakan kelompok miskin kota serta gerakan-gerakan lainnya.

Analisis teori tentang Teori Gerakan Sosial Baru harus dapat menjelaskan tentang pertama dinamika dari mobilisasi manajemen sumberdaya, strategi dan taktik, peran dari pemimpin, respon terhadap lawan dan aliansi; kedua, dinamika organisasi tentang bagaimana proses rekrutmen, peran pemimpin dan pihak ketiga, tipe target dan tujuannya, dan perubahan tujuan; ketiga, keberadaan jaringan sosial. Sifat alamiah dari jejaring ini, dan bagaimana kelompok memilih pemimpin barunya, jalur-jalur komunikasinya, dan perasaan identitas kelompok (Canel, 1997).

Dalam Canel (1997) perbedaan yang sangat jelas antara gerakan sosial dari sudut pandang Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya adalah pada aspek kontinuitas dan diskontinuitas dalam hal manajemen sumberdaya, dinamika organisasi, proses politik, strategi dan jejaring sosial. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa diperlukan pengamatan empirik dan hati-hati dalam melihat ini semua. Canel mengajukan preposisi bahwa dalam kenyataan sehari-hari diperlukan pendekatan terintegrasi terhadap kedua teori di atas karena Teori Gerakan Sosial Baru lebih menekankan pada faktor-faktor yang berurusan dengan proses tingkat makro sementara untuk Teori Mobilisasi Sumberdaya lebih menekankan pada faktor-faktor dan proses di tingkat mikro yang lebih membutuhkan kegiatan *strategic instrumental*. Hanya dengan sebuah teori yang

menggabungkan keduanya, gerakan sosial dapat memberikan penjelasan antara mikro dan makro, hubungan antara masyarakat sipil dan negara, aksi instrumental dan ekspresif, politik atau struktur kekuasaan dan kultural.

Tabel 1. Perbedaan Gerakan Sosial dari pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya dan Pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru

Teori	Mobilisasi Sumberdaya	Gerakan Sosial Baru
1	Kontinuitas	Diskontinuitas
2	Integrasi Sistem	Integrasi Sosial
3	Negara	Masyarakat Sipil
4	Realisme Politik	Realisme Kultural
5	Aksi Instrumental	Aksi Ekspresif

Sumber: Canel (1997)

Merujuk Mansour Fakih, saat ini telah terjadi krisis *developmentalis*, suatu era di mana peran utama dan pemimpin pembangunan adalah negara (*state-led development*). Model ini dulu ditetapkan sebagai alternatif sejak krisis liberalisme pada zaman kolonialisme dan imperialisme liberal di tahun 30-an. Sejak saat itu, negara menjadi aktor utama atau diberi wewenang sebagai pengendali ekonomi dan politik. Dimana negara menjadi aktor penting dalam ekonomi (*keynesian economic*). Namun pada saat yang sama, negara juga dianggap bertanggungjawab dalam melindungi dan mencegah setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengantar buku yang membahas tentang gerakan sosial baru di Indonesia di era globalisasi ini, ia menyatakan bahwa gerakan-gerakan yang ada di Indonesia adalah gerakan-gerakan sosial baru. Gerakan-gerakan yang dibahas dalam radikalisme kaum pinggiran, adalah gerakan sosial yang masuk dalam kelompok gerakan sosial baru (Fakih dalam Zubir, 2002).

Sementara itu Hess (2007) memberikan definisi *social movement organization* (smo) atau organisasi gerakan sosial yang biasanya dibahas dalam gerakan sosial adalah

salah satu tipe organisasi masyarakat sipil bisa dibedakan berdasarkan keunikannya seperti memiliki cakupan luas dan keragaman organisasi dan berjangka waktu panjang, memiliki tujuan yang berakibat pertumbuhan sosial secara fundamental dan dari kelompok-kelompok yang dilemahkan atau merasa dilemahkan memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk mempergunakan strategi *extra-institusional* seperti halnya demonstrasi. Batasan yang diberikan bertujuan untuk membedakan gerakan sosial dengan organisasi tunggal atau jejaring kecil yang melakukan kegiatan aktifis, dan dapat dibedakan dengan kampanye tunggal yang dibatasi oleh topik dan cakupan waktu yang temporer.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pembahasan teori-teori gerakan sosial baru merupakan penciri dari pembahasan sosiologi lingkungan, menunjukkan bahwa terbentuknya tindakan-tindakan kelompok dari kelompok feminisme, dan lingkungan menunjukkan adanya perkembangan terhadap teori-teori gerakan sosial. Sebagai perspektif penelitian konflik perkebunan sawit ini, sebuah gerakan sosial tidak akan berkembang pesat dan bertahan jika faktor peluang terbukanya politik dan ekonomi tidak tersedia. Melihat situasi ini, sejarah dan momentum politik baik itu di tingkat lokal, nasional maupun global menyediakan ruang untuk terbangunnya gerakan lingkungan pemantauan sawit.

Secara umum gerakan lingkungan berkelanjutan terbagi menjadi dua golongan besar yaitu gerakan lingkungan berkelanjutan berbeda antara yang berpaham lingkungan ekologis atau saintifik dengan berpaham lingkungan anti kemapanan. Selain itu secara umum, aspek-aspek yang berbeda tersebut dapat dicerminkan gerakan tersebut oleh pandangan terhadap alam dan ekologi, teori dan penjelasan masalahnya yang digunakan, ideologi dan etika hubungan manusia dan alamnya yang dianut, pandangan politik, perhatian dan fokusnya, pola partisipasi, pandangan terhadap masalah energi, pertumbuhan, dan energi nuklir, dan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Oleh karenanya, secara ideologis kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang melakukan tarik menarik dalam gerakan lingkungan itu sendiri (Thrupp dalam Merchant, 1992). Dengan demikian maka aspek-aspek atau faktor-faktor pandangan dari gerakan lingkungan dipengaruhi oleh anggota-anggota kelompok dan faktor-faktor yang

menjadi masalah utama dalam gerakan lingkungan tersebut selain faktor adanya peluang politik.

Melihat dari gambaran teoritis terhadap kedua pendekatan dari Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya dapat digambarkan bahwa situasi dan kontekstual Indonesia, gerakan lingkungan anti sawit dapat dikatakan sebagai gerakan yang relatif baru, yang hadir setelah kelompok lingkungan melihat diperlukannya tindakan-tindakan yang lebih terorganisir mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan sawit dan industrinya yang saat itu telah menimbulkan masalah kebakaran hutan yang memberikan dampak lintas negara dan juga mendapatkan perhatian komunitas internasional. Dalam penelitian ini kerangka teoritis *social movement* yang bukan hanya *collective action* akan menjadi perspektif dalam melihat gerakan lingkungan anti sawit yang merupakan gerakan lingkungan yang berkembang di Indonesia.

Teoritis Gerakan Sosial Baru New, Melucci dalam Canel (2007) berargumentasi bahwa paradigma Gerakan Sosial Baru berorientasi pada penjelasan ‘mengapa’ gerakan sosial terbentuk yang jawabannya terbatas pada kondisi dalam batasan luas. Sementara itu Teoritis Mobilisasi Sumberdaya menjelaskan aspek-aspek perjalanan dari kondisi yang ada saat ini untuk mencapai tujuan-tujuan dari gerakan tersebut.

Dalam proposisi Canel (1997) perbedaan yang sangat jelas antara Teori Gerakan Sosial Baru dan Mobilisasi Sumberdaya adalah pada aspek diskontinuitas dan kontinuitas dalam hal manajemen sumberdaya, dinamika organisasi, proses politik, strategi dan jejaring sosial. Sementara itu ada empat faktor mempengaruhi proses mobilisasi yaitu organisasi, kepemimpinan, peluang politik dan sifat alamiah lembaga politik. Dalam penelitian ini konsep-konsep diskontinuitas, kontinuitas, pengorganisasian dan kepemimpinan, dan mobilisasi sumberdaya akan menjadi perspektif dalam melihat gerakan lingkungan anti sawit.

Kontinuitas dalam kerangka atau pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya, berfokus pada kontinuitas bentuk kelembagaan dan aksinya. Transformasi yang terjadi sekarang telah dimulai sejak awal abad 19, dimana aktor-aktor kolektif telah melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai aktor aksi kolektif. Konsolidasi kapitalisme dan perkembangan nasionalisasi negara menyebabkan perpindahan aksi dan kelembagaan dari komunal menjadi bentuk asosiasi untuk aksi-aksi kolektif. Sehingga karakter dari aksi

kolektifnya merupakan karakter representasi demokrasi seperti demonstrasi, reli, dan protes atau bentuk-bentuk aksi kolektif lainnya yang sejenis.

Tekanan kontinuitas gerakan sosial menunjukkan adanya kemiripan antara gerakan sosial dan organisasi formal; dan telah ditemukan bahwa ada variasi yang tinggi dari bentuk-bentuk organisasi yang dibentuk oleh gerakan sosial kontemporer. Variabel-variabel utama yang mempengaruhi struktur organisasi dari gerakan sosial di antaranya adalah sifat alamiah gerakan dan tujuan utamanya, seperti aksi ekspresif atau aksi instrumental, mengelola satu isu ataukah banyak isu, melakukan proses rekrutmen perorangan ataukah kelompok, bagaimana peran pemimpin di tingkatan formasi dan pembentukan, dan pengaruh dari pihak ketiga.

Sementara itu aspek diskontinuitas dari pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru, proposisinya pada putusnya atau ketidakberlanjutannya dengan perjuangan tradisional dan aktor-aktornya. Aktor-aktor baru berada di tengah-tengah konflik kontemporer, untuk menaikkan isu baru, membawa nilai-nilai baru, bekerja di ranah baru, mempekerjakan aksi-aksi terbaru dan memiliki bentuk-bentuk organisasi baru. Gerakan sosial baru bekerja di tingkat aksi komunikasi dan sangat memperhatikan reproduksi sosial, integrasi sosial dan sosialisasi. Mereka mengadvokasikan nilai-nilai kesetaraan dan partisipasi, otonomi individu, demokrasi, pluralitas dan perbedaan, penolakan dan manipulasi, peraturan dan birokrasi. Realisme kultural, hasil kreasi dari pemaknaan baru dan interpretasi baru dari norma berada di tingkat integrasi sosial, tidak pada tingkat mekanisme pengatur (negara). Sehingga pertarungan konflik berpindah dari ranah politik ke masyarakat sipil dan di realisme kultural.

Dalam pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya terdapat model *political-interactive model* yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam (dalam Canel, 1997) dimana model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas sebagai faktor penentu gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial akan sulit untuk mencapai tujuannya demikian juga sebaliknya (Phongpaichit, 1999 dalam Triwibowo, 2006).

Sedangkan model yang lain adalah *organizational-entrepreneurial model* yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald yang menyatakan bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial (dalam Canel, 1997) yang diaplikasikan dalam bentuk organisasi formal sebagai *carriers* dari gerakan sosial.

Sementara itu Offe dalam Canel (2007) menyebutkan bahwa aksi-aksi gerakan-gerakan sosial, berupaya mempolitisir masyarakat sipil dengan cara yang tidak memproduksi bentuk-bentuk kontrol, peraturan dan intervensi negara. Dalam penelitian ini, konsep ini bisa diwakili oleh ada tidaknya hubungan antara gerakan sosial dengan sistem politik, karena ranah yang digerakkan adalah masyarakat sipil, dan bersifat temporer untuk tujuan aksi yang sifatnya terputus.

Dalam konsep organisasi dan kepemimpinan, keberadaan organisasi formal menentukan kontinuitas dari gerakan dalam mencapai tujuannya, sehingga dinamika organisasi dalam gerakan sosial menentukan bagaimana gerakan sosial bekerja mencapai tujuan-tujuannya dengan memobilisasi sumberdayanya, baik itu sumberdaya material maupun non material. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya dana, dan jaringan. Keberadaan jaringan sosial (*network sosial*) memberikan koherensi dan hubungan horisontal dalam kelompok, dan juga merupakan fasilitator kunci untuk melakukan aksi kolektif. Telah dapat diargumentasikan bahwa semi-informal *network*, atau konteks mikro-mobilisasi, menyediakan hubungan antara tingkat mikro dan makro dari pembentukan kelompok-kelompok.

Di Tabel 2 (halaman 29) digambarkan konsep-konsep dan variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang dipergunakan sebagai kerangka untuk penelitian adalah faktor-faktor ideologi yang mempengaruhi kemunculan dari gerakan sosial, faktor diskontinuitas sebagai ciri dari bentuk gerakan sosial yang ekspresif, dan faktor kontinuitas yang mencirikan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan faktor organisasi dan kepemimpinan yang menggambarkan tentang bagaimana gerakan sosial diorganisasikan dan kepemimpinan dalam gerakan, yang terakhir adalah faktor manajemen sumberdaya gerakan sosial yang dicerminkan oleh bagaimana organisasi gerakan sosial memobilisasi sumberdayanya.

Tabel 2. Konsep-konsep dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

Konsep	Variabel
1 Ideologi gerakan lingkungan	pandangan terhadap alam dan ekologi, teori dan penjelasan masalahnya yang digunakan, ideologi dan etika hubungan manusia dan alamnya yang dianut
2 Diskontinuitas (Terhadap perjuangan sebelumnya)	Topik isu (simbolik/historikal), Jumlah isu (single/multiple), Partisipasi individu/kelompok (paruh waktu/jangka panjang), Liputan Media (<i>Media Coverage</i>)
3 Kontinuitas (berhubungan dengan jaringan sosial, dinamika organisasi, dan proses politik)	Keberadaan <i>social movement organizations</i> atau <i>social movement organization</i> (organisasi enterpreneur), Jaringan Sosial, Keberadaan hubungan dan akses pada perubahan kebijakan/politik,
4 Organisasi dan kepemimpinan	Bentuk organisasi (informal/formal); keanggotaan (individu/kelompok; klasik/kontemporer <i>social movement organization</i>); orientasi; modus aksi berupa Masalah kompleks dan program, strategi dan taktik; Struktur yang tersentralisasi/hirarkis atau pengorganisasian tersegmentasi/reticulate; Dinamika antara <i>social movement organization</i> yang berbeda tujuan dan strategi, Kompetisi maupun kolaborasi dengan lembaga-lembaga tradisional
5 Manajemen sumberdaya (fokus pada bagaimana kelompok berorganisasi untuk mencapai tujuan dengan memobilisasi sumberdaya baik itu material maupun non material)	sentralisasi/desentralisasi (otonomi), pencapaian tujuan jangka pendek/jangka panjang; tujuan perubahan institusional/partisipasi akar rumput;

Source: penulis, dari berbagai referensi Canel (1997); Hess (2007)